BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adalah Antonio Gramsci, seorang teorisi Marxis kelahiran Ales, Italia, yang pertama kali merevisi dan mengembangkan konsep hegemoni, sehingga pengertian hegemoni yang kita kenal dewasa ini, terbedakan dari konsep hegemoni yang terdahulu. Mengacu pada artikel yang dimuat dalam Wikipedia, pengertian mendasar atas konsep hegemoni itu sendiri berarti,

> *"…was a concept previously used by Marxists such as Lenin to indicate the political leadership of the proletariat in a democratic revolution, but developed by Gramsci into an acute analysis to explain why the 'inevitable' socialist revolution predicted by orthodox Marxism had not occurred by the early 20th century."*
> (Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci).

Dari kutipan di atas, kita dapat melihat bahwa jauh sebelum Gramsci, Lenin telah terlebih dahulu mengadopsi konsep hegemoni; yang kemudian dipergunakanya sebagai sebuah cara untuk melegitimasi peran penting kepemimpinan politik kaum proletar dalam pembentukan revolusi demokratis.

Perihal tentang pemahaman revolusi itu sendiri, menurut Gramsci, setelah memasuki kurun waktu abad ke-20 dan seterusnya, tak lagi terkonotasikan sebagai sebuah perlambang arena perebutan kekuasaan, dimana satu-satunya cara yang berlaku adalah dengan menumbangkan dan mengeliminasi setiap elite atau pemimpin yang masih bercokol di atas kursi kepemimpinan terdahulu, sebagaimana pandangan politik yang selama ini dianut oleh para kelompok Marxis tradisional.

Para penggiat revolusi dari kaum yang tersubordinatkan, tak pernah berpikir, bahwa kapitalisme yang selama ini mereka perangi telah ikut pula berevolusi. Kapitalisme dalam pengertian Gramsci,

> *"…maintained control not just through violence and political and economic coercion, but also ideologically, through a hegemonic culture in which the values of the bourgeoisie became the 'common sense' values of all. Thus a consensus culture developed in which people in the working-class identified their own good with the good of the bourgeoisie, and helped to maintain the status quo rather than revolting."* (Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci).

Konsep pengambil alihan budaya seperti inilah yang kemudian dikonsepsikan oleh Gramsci sebagai satu dari sekian pengertian tentang konsep hegemoni. Menurut Ania Loomba, istilah hegemoni itu sendiri berarti, "kekuasaan yang dicapai melalui suatu kombinasi paksaan dengan kerelaan" (Loomba, 2003: 38).

Berangkat dari pandangan Machiavellian akan pentingnya pemaksaan dan tipuan dalam menjalankan kekuasan, Gramsci, sambil merevisi tesis-tesis dan teori-teori Marx, menyatakan bahwa prasyarat yang mendorong tingkatan suatu kelas menuju level pemegang kekuasaan dapat terjadi jika dalam proses legalisasi salah satu kelas telah berhasil menundukan kelas yang lain, baik itu menggunakan metode yang bersifat koersif maupun persuasif. Adapun jika kekuasaan tersebut telah menemui titik finalnya, maka kedua proses inilah yang dikemudian harus dirumuskan dan diterapkan kedalam program-program kerja secara imbang dan beriringan.

Koersif berarti tindak pendominasian yang hendak dicapai dilaksanakan melalui proses terhubungnya penggunaan kekuatan serta kekerasaan dalam usaha

mensejajarkan setiap tuntutan dari kelas yang berkuasa, dengan terbentuknya rasa ketaatan yang menjadi manifestasinya kelak. Mengutamakan tindakan represif ketimbang tindakan ideologis.

Secara umum, dari kedua metode penguasaan tersebut, metode persuasiflah yang kemudian paling banyak mengalami penekanan lebih lanjut. Tidak seperti metode yang pertama, metode persuasif, selain bergantung pada peranan ideologis, pun ia sering dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang merepresentasikan pesan-pesan perdamaian lewat jalur budaya.

Ideologi sendiri, terkait dengan metode persuasif, tidak sekadar diartikan sebagai cerminan dari realitas yang berbasiskan material. Ideologi, bagi Gramsci, adalah “konsepsi-konsepsi kehidupan yang tampak dalam semua aspek eksistensi dan kolektif.” (Loomba, 2003: 39). Dengan kata lain, hubungan-hubungan sosial, serta wilayah-wilyah sosial dimana manusia tinggal dan bergerak di atasnya merupakan hasil dari yang selama ini disebut sebagai daya cipta ideologi-ideologi.

Ideologilah yang kemudian “mengorganisasi massa manusia, dan menciptakan wilayah di atas mana manusia bergerak, memperoleh kesadaran atas posisi, perjuangan mereka dan sebagainya.” (Loomba, 2003: 39). Hingga apa-apa yang telah diperoleh dari capaian-capain ideologi, tak jarang untuk dikemudian dipersepsikan sebagai suatu kenalaran umum.

Di kemudian hari, konsep hegemoni dan ideologisasi ini diwarisi oleh Louis Althusser, seorang teorisi dan kritikus Marxis asal Perancis. Dalam tesis berjudul *Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Toward an Investigation* —yang ditulisnya pada tahun 1970— Althusser, selain memetakan

dan memerinci kembali gagasan-gagasan politik Gramsci secara komprehensif, pun ia menyertakan pelbagai pengembangan konsep lainnya —yang kebanyakan dipinjamnya dari psikoanalisis Freud dan Lacan.

Althusser menyingkap lanskap pemikirannya dengan terlebih dahulu mengajukan kritikannya terhadap pemikiran Marx; menyoroti permasalahan yang terdapat dalam hubungan antara ‘basis’ dan ‘suprastruktur’. Berbeda dengan pandangan Marxisme tradisional yang menggarisbawahi hubungan antara basis dan suprastruktur sebagai sebuah relasi yang statis, menurut Althusser teori Marx sangatlah relatif dan tidak selesai hanya pada satu konteks saja.

Selain mengetengahkan permasalahan hubungan basis dan suprastruktur, Althusser kemudian mengajukan konsep pelegitimasian kekuasaan yang dirumuskannya sebagai *Repressive State Apparatus* (SA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA). Sebagaimana pendahulunya, Althuseer melihat artikulasi atas hadirnya bahasa sekaligus pola kekuasaan yang terdapat di masyarakat selalu mengambil tempat tepat ditengah terikatnya kesadaran individu-individu yang pada akhirnya senatiasa bertujuan mengekspresikan ideologi jauh di atas kepentingan personal mereka. Kedua aparatus inilah —Aparatus Negara Represif (RSA) dan Aparatus Negara Ideologis (ISA)— yang kemudian berperan untuk terus mengawasi simpul yang diikatkan pada segala bentuk kesadaran dan independensi masyarakatnya.

Dalam peta pemikiran yang dirumuskan oleh Althusser, manusia tidak pernah memiliki keberpusatan yang asali, sehingga penegasian ataupun penolakan terhadap ideologi yang lebih dominan nampak tak lebih dari sekedar harapan-

harapan utopis. Tak adalagi sesuatu yang benar-benar privat ketika bersentuhan dengan ideologi. Dengan sendirinya aktualisasi seseorang akan tercerabut dari ranah individualitasnya, dipaksa sedemikian rupa untuk terus berpartisipasi dalam konstruksi ideologi tertentu, meski hal tersebut dirasa sebagai suatu hal yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya.

Lain Althusser, lain pula Gramsci. Konsep hegemoni di tangan Gramsci merupakan sebuah wacana kekuasaan yang terbuka. Sehingga, bukan tidak mungkin dalam wacana kekuasaan semacam ini, pretensi sekaligus hasrat berkebebasan yang disuarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan bisa berubah menjadi perlawanan, karena "... hegemoni merupakan suatu kondisi dalam proses, maka akan ada wacana perlawanan kelompok terbawahkan yang ternegosiasikan dan terikat dalam konsensus" (Ajidarma, *Kompas*, 19 Juni 2005: 17).

Mengacu pada pemaparan konsep hegemoni dan pengertian ideologi di atas, berikut penulis cantumkan penggalan narasi dari Novel *1984*,

> *"And the Records Departement, after all, was itself only a single branch of the Ministry of Truth, whose primary job was not to reconstruct the past but to supply the citizens of Oceania with newspapers, films, textbooks, telescreen programmes, plays, novels —with every conceivable kind of information, instruction, or entertainment from statue to a slogan, from a lyric poem to a biological treatise, and from a child's spelling book to a newspeak dictionary" (Orwell, 1954: 38).*

yang secara literal dapat diterjemahkan sebagai,

> "Dan Departemen Catatan ini sendiri, bagaimanapun juga, hanyalah salah satu cabang dari Kementerian Kebenaran, yang tugas utamanya bukan merekonstruksi masa silam, namun memasok warga negara Oceania dengan surat kabar, film buku daras, acara teleskrin, drama novel —berisikan segala jenis

> informasi, instruksi, atau hiburan yang bisa dibayangkan, mulai syair liris sampai risalah biologi, dan mulai pelajaran mengeja bagi anak-anak sampai kamus *Newspeak*." (Simatupang, 2003: 77-78)

Sebagaimana penggunaan metode persuasif dalam konsep hegemoni yang dipaparkan oleh Gramsci dan pemahaman ideologi dalam tesisnya Althusser, Departemen Catatan, selaku aparatus negara yang berperan untuk menyebarluaskan kebenaran versi penguasa kepada setiap warga negara Oceania, mengejawantahkan (baca: memanifestasikan) ideologi mereka melalui pengembangan produk serta hasil-hasil bentukan budaya. Sebuah kebudayaan yang telah terlebih dahulu diselaraskan dengan misi-misi pemerintah Oceania

Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep hegemoni dan ideologi yang dimunculkan serta penolakan yang ditimbulkannya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, terdapat korelasi yang jelas antara konsep hegemoni dan ideologi dengan metode penguasaan yang digunakan oleh pemerintahan Oceania dalam novel *1984*; hingga pemunculan perlawanan tokoh Winston Smith terhadap kekuasan tersebut. Adapun masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada konsep hegemoni menurut Gramsci dan konsep ISA serta RSA menurut Althusser, mediasi dan cara apa saja yang digunakan pengarang dalam memperlihatkan konsep hegemoni dan ideologi pada tubuh Partai Ingsoc?

2. Melalui narasi yang dipaparkan, dalam bentuk apa saja dan bagaimana perlawanan tokoh Winston Smith dimunculkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, selain mengetahui konsep hegemoni dan ideologi dalam novel *1984* secara komprehensif, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep hegemoni dan ideologi yang direalisasikan oleh pengarang dalam negara Oceania, berdasarkan pada pengertian hegemoni dan ideologi menurut Gramsci maupun Althusser
2. Menjelaskan setiap bentukan perlawanan yang dimunculkan tokoh Winston Smith

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mempelajari secara lebih dalam lagi keberadaan serta alasan dimunculkannya suatu gagasan politik dalam karya novel. Bagi pembaca, penelitian ini berguna sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sastra ke depannya.

Besar harapan penulis, dengan terselesaikannya penelitian ini dapat merangsang minat masyarakat dalam mengapresiasi karya-karya sastra, dan menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu rujukan atau bagian dalam kegiatan tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu peranakan dari kesenian yang mengaksentualkan pencerapan ruang-waktu, sastra tidak semata-mata hanya dibangun di atas potongan imajinasi ataupun —meminjam istilah Juniarso Ridwan dalam *Pikiran Rakyat*, 7 Mei 2005: 23— 'diskresi estetik' sang pengarangnya saja.

Pada proses kreatifnya, kondisi serta situasi sosial-lah yang kemudian menjadi *raison d'etre* sastra. Karena, tidak bisa tidak, seorang pengarang adalah mereka yang senantiasa memiliki tagihan-tagihan hutang pada alam kosmos yang meminjaminya tempat untuk memperoleh selentingan imaji-imaji yang tak biasa, pada lingkungan sosial yang dijadikan sebagai sandaran bagi keberlangsungan proses kreatifnya selama ini.

Sastra, selain sifatnya yang indah dan menghibur, harus pula memberikan sikap pembelajaran kepada setiap pembacanya. Sastra ada untuk menyingkap kebenaran melalui cara yang lain daripada biasanya. Hal serupa sebagaimana yang dikemukakan oleh George Orwell dalam essainya yang berjudul *Why I Write*. Orwell menulis,

> *"When I sit down to write a book, I do not say to myself, 'I am going to produce a work of art'. I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and my initial concern is to get a hearing." (Orwell: http://orwell.ru/why_i_write.htm).*

Masih berkenaan dengan konteks yang sama, sastra adalah sesuatu yang menghidupkan sensitifitas kemanusiaan pengarangnya. Sehingga,

> "...kenyataan yang dilihatnya tidak ia beri makna umum sebagaimana masyarakat kebanyakan mengartikannya. Namun ia dapat melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda, menciptakan dunia makna yang tersendiri sehingga kenyataan atau

> pengalaman tersebut menjadi suatu hal yang mengesankan bahkan memberi banyak pelajaran. (Dahana, 2002: 60).

Dalam konteks kemajemukan, seorang pengarang tidak bisa berkilah atau lari dari kenyataan sosial yang dihadapkan pada kesadarannya. Setiap usaha pensimplifikasian yang ditujukan sebagai bentuk penyeragaman dan pengelompokan manusia pada apa yang disebut dengan meminiaturisasikan kesadaran individu, tiada bedanya dengan tindakan seorang yang destruktif. Dan, bukan tidak mungkin, pada capaian tertentu, akan melahirkan penentangan. Sebagaimana yang ditulis oleh pengarang asal Perancis, Andre Gide, dalam buku *Matinya Tuhan Komunis*,

> "...kemanusiaan adalah sesuatu yang kompleks dan sama sekali tidak seragam—ini harus diterima—dan setiap upaya penyederhanaan dan pemaksaan, setiap usaha dari luar untuk mereduksi apa dan siapa saja menjadi penyebut yang sama, akan senantiasa memuakan, merusak, dan berbahaya." (Gide, 2004: 266)

Alih-alih memungsingkan kemajemukan tersebut sebagai sebuah identitas yang patut untuk terus dijaga, para pembentuk kekuasaan justru berusaha sebisa mungkin untuk mengesampingkannya; menetapkannya sebagai bentukan peradaban yang cacat, sehingga tak mungkin bisa sejalan atau berpihak pada kebijakan-kebijakan mereka.

Sebagai salah satu contoh dari gambaran sifat pemerintah yang despotik, bisa kita lihat pada penggalan narasi novel *1984* berikut ini,

> *"Do not imagine that you will save yourself, Winston, however completely you surrender to us. No one who has once gone astray is ever spared. And even if we chose to let you live out the natural term of your life, still you would never escape from us. What happens to you here is for ever." (Orwell, 1954: 206)*

Dari penggalan narasi di atas, dapat ditarik simpulan bahwa di luar wewenang pemerintah, tak ada yang bisa mengontrol dan membentuk kesadaran individu, sekalipun individu yang bersangkutan. Pemerintah harus selalu berada di atas segalanya, karena pemerintah dalam pemahaman yang totaliter adalah yang absolut dan menolak segala bentuk perbedaan.

Namun sebagaimana penjabaran konsep hegemoni di atas, bukan tidak mungkin jika perlawanan bisa terjadi, dan tidak terbatas pada bentuknya yang formal dan massif (misal: kudeta). Hubungan perlawanan dengan konsep hegemoni tersebut, bisa kita lihat dalam penggalan narasi yang menggambarkan konflik batin yang terjadi pada tokoh utama *1984*, Winston Smith, berikut ini:

> *And yet he was in the right! They were wrong and he was right. The obvious, the silly, and the true had got to be defended. Truisms are true, hold on to that! The solid world exists, its laws do not change. Stones are hard, water is wet, objects unsupported fall towards the earth's centre. With the feeling that he was speaking to O'Brien, and also that he was setting forth an important axiom, he wrote:*
>
> *Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (Orwell, 1954: 37)*

Sang tokoh utama, Winston Smith, berkeputusan untuk membangun garis resistensi (kontra revolusi) guna mempertahankan kebenaran yang selama ini diyakininya. Hal tersebut kemudian dituangkan olehnya kedalam catatan harian. dengan mengasumsikan bahwa makna kebebasan menjadi hak hakiki justru ketika sang subjek menginterpretasikannya sesuai kehendak, sekalipun bertentangan dengan arus sosial disekitarnya.

Ada semacam ketidakadilan yang dilegalisasikan oleh ideologi dan kekuasan partai sebagai jalan utama dalam mengambil langkah tegas. Bahwa

segala macam bentuk dan pola pemikiran yang bertentangan dengan otoritas dan keberlangsungan sejarah partai adalah tindakan subversif atau kontra revolusi.

Dalam kasus tokoh Winston di atas, hasil tulisannya tersebut bisa digeneralisasikan begitu saja sebagai Kejahatan Pikiran, atau dalam jargon politisnya disebut *thoughtcrime* —yang mana cara kerja maupun pelebaran sayap mekanisme operasionalnya bertumpu pada hasil pantauan teleskrin, poster pemimpin partai, hingga peran langsung dari aparatus partai yang bernama *thoughtpolice* (Polisi Pikiran).

1.6 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriftif analitik. Menurut Dra. Siti Waridah Q (1996:120), dalam menyusun karya kepenelitian dengan menggunakan metode tersebut,

> "...semua hasil penelitian dituangkan tidak dalam bentuk statistik, tetapi dalam bentuk uraian naratif. Uraian naratif ditulis setelah seluruh data dianalisis dan diperkaya dengan beberapa informasi melalui analisis komparasi (membandingkan) dengan tidak menghilangkan data aslinya."

Lebih jauh adapun uraian naratif tersebut berfungsi untuk

> "...menjawab dan menguraikan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana fenomena itu terjadi dalam hubungan dengan lingkungannya....Uraian itu di samping merupakan hasil analisis, juga harus disusun secara sistematis dan logis."

Pada proses penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan pengumpulan berbagai data yang relevan, baik itu yang bersumber dari essai, artikel maupun kajian pustaka; yang dilihat dari segi tema, memiliki objek permasalahan yang sama. Pada tahap selanjutnya, data yang telah terkumpul

kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai pada valid tidaknya data tersebut untuk diterapkan sebagai penunjang proses penelitian.

Dari pengklasifikasian tersebut, penulis pada akhirnya dapat menarik hasil akhir penganalisisan yang berupa pemecahan atas kasus yang diangkat dari objek penelitian.

Alasan penulis memilih novel *1984* sebagai objek penelitian adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca sastra, dan pembaca karya-karya Orwell pada khususnya, tentang keterkaitan konsep hegemoni dan ideologi dengan pandangan-pandangan politik pada tokoh sentral karya tersebut.